

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhita, M., dan Suchahyo, U. S. (2020) Akuntabilitas Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Tetap Pemerintah Kota Salatiga, *International Journal of Social Science and Business*, 4(2), 308-314.
- Berliandaldo, M., dan Chodiq, A. (2020) *Naskah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Teknis dan Administrasi BMN secara Terpusat dan Berkelanjutan*, Biro Umum LIPI, Jakarta.
- Fatihudin, D. (2020) *Metodologi Penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Hardani., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., dan Auliya, N. H. (2020) *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Hartanto, N. (2018) Implementasi PP No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa, *Journal of Management Review*, 2(3), 223-237.
- Kaligis, E. A., Kalangi, L., dan Gamaliel, H. (2021) Analisis Pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 207-224.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KM.6/2016 Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.
- Labasido, E. R., dan Darwanis. (2019) Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2), 215-236.
- Masitoh, S. (2021) *Simak PMK Baru yang Mengatur Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara*, (<https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kontan.co.id/news/simak-pmk-baru-yang-mengatur-perencanaan-kebutuhan-barang-milik-negara>), diakses 21 Juni 2022.
- Mawikere, L., dan Neyland, J. (2021) Analisis Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Dinas Pariwisata Kota Tomohon, *Jurnal EMBA*, 9(1), 34-45.

- Nurhazana, Wahyuni, E. S., dan Iznillah, M. L. (2021) *Manajemen Barang Milik Negara*, CV. Pena Persada, Purwokerto Selatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Setiabudhi, D. O. (2019) Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance, *The Studies of Social Science*, 7-21.
- Tarmizi, A. B., dan Sugiartono, E. (2022) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember, *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 2(1), 24-32.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Wafda, I. P., dan Nurhazana. (2020) Mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis*, 170-178.
- Wahyuni, E. S., dan Nurhazana. (2019) Implementasi Penerapan Manajemen Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Studi Kasus di Politeknik Negeri Bengkalis). *Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7*, 72-92.